

TAJUK RENCANA

Plus Minus Penjurusan (Lagi) di SMA

SMA akan memberlakukan lagi penjurusan seperti masa lalu, yakni IPA dan IPS. Sistem penjurusan tersebut, menurut Mendikdasmen Abdul Mu’ti dianggap lebih punya nilai positif, dibandingkan tanpa penjurusan.

Namun ada pro dan kontra terkait pengembalian sistem penjurusan atau peminatan. Beberapa pihak menilai penjurusan membantu siswa fokus, sementara yang lain menilai terlalu membatasi pilihan dan belum sinkron dengan kebutuhan perguruan tinggi. Karena itu harus ada inovasi.

Penjurusan di SMA sering menimbulkan stigma negatif, terutama bagi siswa IPS dan Bahasa, yang dianggap kurang cerdas atau nakal. Hal ini musti menjadi perhatian dalam dunia pendidikan dan mendorong adanya perubahan sistem, seperti penghapusan penjurusan di Kurikulum Merdeka.

Memang saat ini, penjurusan di SMA, khususnya antara IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan, antara lain hampir semua pelajaran IPA melatih kemampuan berhitung dan berpikir logis, yang bermanfaat untuk berbagai profesi di masa depan. Karena itu siswa IPA cenderung lebih kritis dan kreatif karena sering dihadapkan pada masalah yang harus dipecahkan secara ilmiah. Ada anggapan bahwa siswa IPA lebih cerdas, sehingga menimbulkan tekanan sosial dan ekspektasi tinggi.

Sedang siswa IPS lebih tanggap terhadap isu-isu sosial dan perkembangan masyarakat. Siswa IPS sering mendapat stigma sebagai “kurang pintar” atau “nakal” dibandingkan siswa IPA, meski ini tidak benar. Lulusan IPS umumnya tidak bisa memilih jurusan sains di perguruan tinggi, sehingga pilihan lebih terbatas. Mata pelajaran IPS lebih sedikit praktikum, sehingga pengalaman belajar lebih banyak teori.

Siswa yang ternyata lebih berniat pada bidang sosial bisa merasa kurang berkembang karena materi lebih banyak sains. Siswa IPS banyak belajar tentang interaksi sosial, komunikasi, dan isu-isu masyarakat.

Karena itu, ketika nanti memilih jurusan IPA atau IPS di SMA sebaiknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan rencana masa depan siswa. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, serta tantangan yang berbeda. Penting untuk menghilangkan stigma negatif dan mendukung setiap pilihan siswa agar dapat berkembang optimal sesuai potensinya.

Sementara, peluang kerja lulusan IPS sangat luas di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, komunikasi, dan beberapa bidang teknik tertentu. Namun, secara keseluruhan, lulusan IPA memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memilih bidang kerja karena dapat masuk ke ranah sains maupun sosial. Pilihan terbaik tetap bergantung pada minat, bakat, dan rencana karier masing-masing siswa.

Stigma bahwa siswa IPA lebih pintar dari IPS adalah persepsi yang keliru dan merugikan perkembangan siswa. Dengan mengedepankan minat, memberikan edukasi yang benar, menghapus sistem yang kaku, serta mengapresiasi semua prestasi, stigma ini dapat dihilangkan. Setiap jurusan memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa, dan semua siswa berhak dihargai atas pilihan dan kemampuannya masing-masing.

Sebab itulah, sekolah penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap jurusan memiliki keunggulan dan peluang karier yang luas, baik IPA maupun IPS. Sosialisasi tentang prospek kerja dan kontribusi ilmu sosial perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak lagi memandang IPS sebagai jurusan “kelas dua. Guru harus menjadi teladan dalam menghargai semua jurusan dan tidak membedakan siswa berdasarkan pilihan bidang studinya. (**)-d

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H.Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkrk23@yahoo.com, iklanlkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaida Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryarti, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.
Kuloprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Menjaga Defisit APBN di Tengah Godaan Populisme



PEMERINTAH

menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dalam dua bulan pertama tahun ini, defisit sudah mencapai Rp 31,2 triliun (0,13 persen terhadap PDB), dan melonjak menjadi Rp 104,2 triliun pada akhir Maret. Tren ini menimbulkan kekhawatiran bahwa defisit berpotensi melebar melampaui target, terlebih jika tidak disertai langkah korektif yang memadai.

Sejumlah ekonom menyuarakan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program-program populis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memang memiliki nilai sosial, namun juga menyerap anggaran dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Ketika belanja negara terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan penerimaan yang signifikan, tekanan terhadap defisit pun tak terhindarkan.

Defisit yang melebar akan menimbulkan konsekuensi fiskal dan makroekonomi yang serius. Selain meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan pasar terhadap disiplin fiskal pemerintah. Di tengah tekanan global dan ketidakpastian ekonomi, menjaga kredibilitas fiskal menjadi elemen kunci bagi stabilitas ekonomi nasional.

Efisiensi dan Dampak ke Dunia Usaha

Sebagai respons atas potensi pelebaran defisit, pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun. Langkah ini mencerminkan kehati-hatian fiskal dan perlu diapresiasi. Namun, efisiensi dalam skala besar juga memiliki implikasi ke sektor riil, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada belanja negara.

Industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak awal. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas, kegiatan konferensi, dan pertemuan pemerintah mengurangi permintaan terhadap jasa-jasa mereka secara drastis. Di daerah, kegiatan ekonomi yang bertumpu pada agenda pemerintah turut melambat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

ADA hal yang lebih penting dibanding sekadar membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) DANANTARA sebagai *superholding* BUMN. Sudah mendekati dua bulan pemerintah telah resmi *me-launching* BPI DANANTARA sebagai badan khusus untuk mengelola investasi negara dalam menunjang perekonomian nasional. Tetapi hingga sekarang, belum ada terobosan program yang signifikan dari lembaga bentukan presiden Prabowo ini.

Sebagaimana kita ketahui, setidaknya ada 7 BUMN raksasa yang akan dikonsolidasikan oleh BPI DANANTARA, yakni perusahaan yang memiliki aset tertinggi anantara lain Pertamina, PLN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Telkom Indonesia dan termasuk *holding* BUMN pertambangan MIND ID. BUMN raksasa inilah sebenarnya yang dicoba untuk dikelola dalam bentuk *sovereign wealth fund* (SWF). Jika ditelusuri, pembentukan SWF sejatinya sudah digagas dalam waktu cukup lama. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan fundamental saat ini adalah, apa urgensi membentuk *superholding* ini? Apakah dengan kondisi hari ini kita sudah siap? Lebih jauh lagi, apa dampak konkritnya bagi masyarakat Indonesia? Sebenar-benarnya berdasarkan temuan penulis, pertanyaan belum memiliki jawaban yang jelas hingga hari ini.

BPI DANANTARA sebagai lembaga baru akan mengelola aset atau *asset under management* (AUM) sekitar USD 600 miliar dan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan mengalami peningkatan hingga mencapai USD 982 miliar atau hampir USD 1 Triliun. Nilai ini tentu cukup fantastis karena setara dengan 60% dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Jika demikian, dapat kita bayangkan betapa keberhasilan BPI DANANTARA menjadi tonggak utama atau tolok ukur keberhasilan ekonomi nasional ke depan. Te-

Edo Segara Gustanto

Karena itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan secara selektif dan berdasarkan prioritas pembangunan. Pemotongan tidak bisa dilakukan merata tanpa pertimbangan dampak sosial dan ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu memastikan efisiensi ini diiringi perbaikan tata kelola belanja negara, agar setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan nilai tambah maksimal.

Alternatif Pembiayaan dan Reformasi Fiskal

Untuk menjaga ruang fiskal tetap terbuka, pemerintah berencana menjalin

kerja sama pembiayaan dengan pihak lain, termasuk sektor swasta. Skema seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi alternatif dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor produktif tanpa membebani APBN secara langsung. Namun, pendekatan ini membutuhkan transparansi dan manajemen risiko yang kuat agar tidak menimbulkan kewajiban tersembunyi di masa depan.

Di sisi lain, langkah jangka menengah yang tidak kalah penting adalah memperkuat basis penerimaan negara. Reformasi perpajakan, digitalisasi sistem fiskal, serta penertiban belanja yang tidak produktif perlu menjadi agenda prioritas. Ketahanan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh penghematan, tetapi juga oleh keberhasilan meningkatkan pendapatan secara adil dan berkelanjutan.

Akhirnya, menjaga defisit tetap dalam batas aman adalah bagian dari tanggung jawab jangka panjang pemerintah terhadap stabilitas ekonomi. Program populis tetap dapat dijalankan, tetapi harus didasarkan pada kalkulasi fiskal yang ma-



KR-JOKO SANTOSO

tang dan strategi *exit* yang jelas. Kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak harus mengorbankan kesehatan fiskal negara. Justru keberpihakan sejati terletak pada keberanian untuk mengelola anggaran secara berimbang, adil, dan berkelanjutan.

Penutup

Mengelola APBN dalam situasi yang penuh tekanan seperti saat ini menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara dorongan politik untuk menjalankan program sosial yang masif dengan kewajiban menjaga stabilitas fiskal yang berkelanjutan. Keberhasilan menjaga defisit tetap dalam koridor aman tidak hanya akan mencerminkan disiplin fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, dunia usaha, dan masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika program populis dijalankan tanpa perhitungan fiskal yang matang, dampaknya justru bisa kontraproduktif bagi perekonomian, terutama dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, seluruh langkah kebijakan harus didasari pada transparansi, efektivitas, dan pengukuran dampak yang terukur. Kejelasan prioritas belanja, peningkatan kualitas penerimaan negara, serta kolaborasi cerdas dengan sektor swasta adalah jalan yang patut ditempuh.

Pemerintah memiliki ruang untuk berinovasi dalam pembiayaan, tetapi juga wajib menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan. Di tengah godaan populisme fiskal, keputusan yang rasional dan berbasis data akan menjadi penentu arah perekonomian nasional. Seperti halnya rumah tangga yang bijak, negara pun tidak bisa membelanjakan lebih dari yang mampu ditanggungnya tanpa mengorbankan masa depan generasi berikutnya. (*)-d

***Edo Segara Gustanto, Akademisi & Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara .**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

daya saing BUMN Indonesia di pasar global. Pertanyaannya apakah kita sudah memenuhi syarat itu?

Alih-alih mengubah BUMN menjadi *superholding*, hal yang lebih *urgent* dan cukup fundamental adalah pentingnya menyelesaikan persoalan budaya tata kelola (moral dan mentalitas korup) harus diperbaiki. Kualitas lembaga dan SDM menjadi faktor kunci, seperti hasil penelitian Daron Acemoglu, dkk peraih Nobel Ekonomi 2024, menyatakan sekaligus mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh investasi, tetapi juga oleh struktur politik dan kualitas institusi. Bagaimanapun juga BUMN memiliki peran yang cukup krusial dalam ekonomi dan pembangunan nasional sebagaimana amanat UUD 1945 guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan masyarakat banyak yang menaruh harapan yang lebih, sehingga dengan situasi dan kondisi BUMN saat ini, sebaiknya lebih fokus pada peningkatan kinerja bukan pada membentuk organisasi seperti *superholding*. Persoalan ini lebih dari sekadar antara *holding, superholding* atau tidak *holding*. (*)-d

***Pristanto Silalahi SE MSE, Dosen Ekonomi- Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

Pojok KR

Timnas U-17 kalah telak 0-6 atas Korea Utara.
- **Garuda muda tidak boleh patah semangat.**

Calhaj diminta jangan banyak bermedsos di Tanah Suci.
- **Tetap fokus beribadah.**

Walikota Yogya targetkan 'Merdeka' Sampah.
- **Harus didukung warga, ketimbang jadi 'rasanan'.**
Berabe